



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BANGKALAN**

2022
LKJIP

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

 [@bpkad.bangkalan](https://www.instagram.com/bpkad.bangkalan)

 (031) 3098579

 Jl. Soekarno Hatta No. 35, Bangkalan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
TAHUN 2022



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangkalan, 28 Februari 2023

KEPALA BPKAD
KABUPATEN BANGKALAN



ABDUL AZIZ, S.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197407292003121006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DARTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	6
D. Landasan Hukum	8
E. Sistematika	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis	10
B. Rencana Kinerja Tahun 2022.....	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	27
B. Realisasi Anggaran.....	45
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47
BAB IV PENUTUP	51
LAMPIRAN	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	12
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama	13
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2022.....	14
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	16
Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Tahun 2022	16
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja.....	27
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	28
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja.....	30
Tabel 3.4 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	32
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota Lain	33
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi.....	33
Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	35
Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	45
Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No.

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas: Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

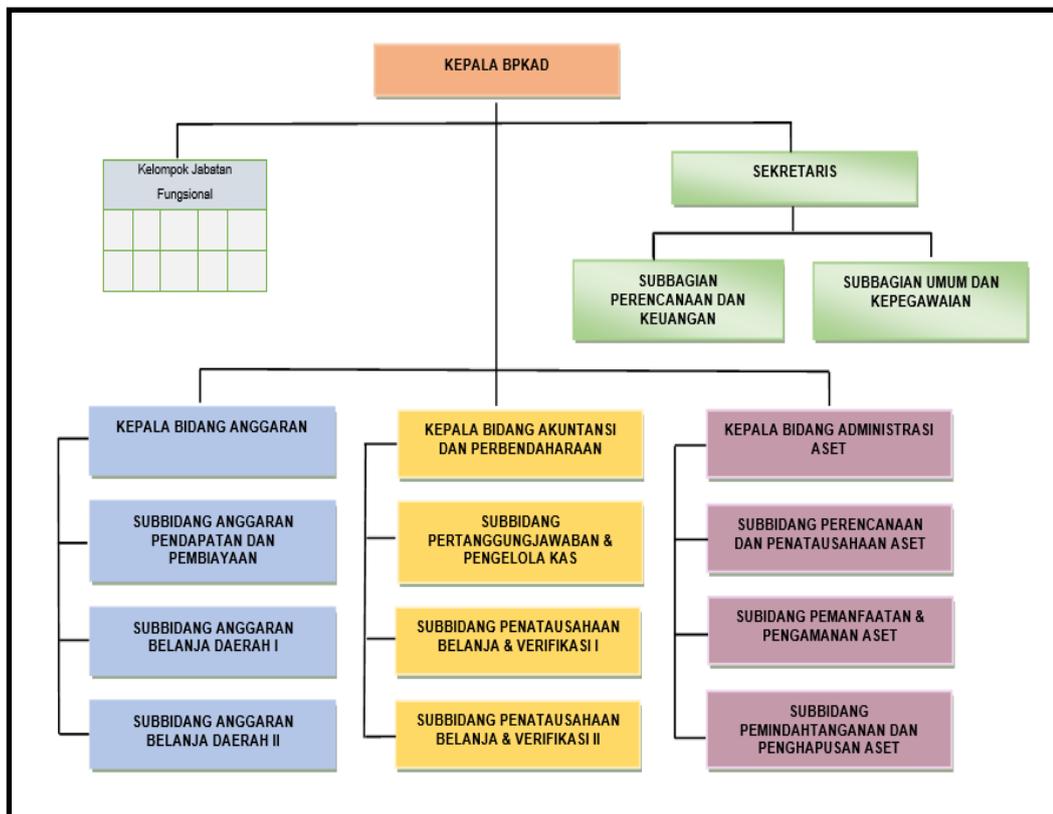
- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Badan sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Anggaran, membawahi:

- 1) Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
- 2) Sub Bidang Anggaran Belanja Daerah I;
- 3) Sub Bidang Anggaran Belanja Daerah II;
4. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Kas;
 - 2) Sub Bidang Penatausahaan Belanja dan Verifikasi I;
 - 3) Sub Bidang Penatausahaan Belanja dan Verifikasi II;
5. Bidang Administrasi Aset, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset;
 - 2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset;
 - 3) Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi



Uraian tugas dari susunan struktur organisasi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dijabarkan sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah dalam rangka melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyusunan program kerja sekretariat;
- 2) Pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang keuangan;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja salna, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- 4) Pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- 5) Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundangundangan;
- 6) Pengelolaan barang milik daerah;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Anggaran, mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang Anggaran;
- 2) Penyiapan bahan inventarisasi, mendistribusikan dan mensosialisasikan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan;
- 3) Penyiapan bahan inventarisasi, menganalisa dan mengolah bahan serta data-data pendapatan dan pembiayaan dalam rangka penyusunan rancangan APBD serta rancangan perubahan APBD;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi pembahasan dan memverifikasi RKA SKPD dan SKPKD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan sebagai bahan penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- 5) Penyiapan bahan penyusunan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait pendapatan dan pembiayaan;
- 6) Penyiapan bahan penyusunan anggaran kas pendapatan dan pembiayaan;
- 7) Penyiapan bahan koordinasi pembahasan, verifikasi dan pengesahan DPA dan DPPA SKPD dan SKPKD terkait dengan

pendapatan dan pembiayaan sebagai dasar pelaksanaan APBD dan perubahan APBD;

- 8) Penyiapan bahan koordinasi dan kompilasi bahan terkait dengan pendapatan dan pembiayaan untuk jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- 9) Penyiapan bahan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan;
- 10) Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan pembiayaan;
- 11) Penyiapan bahan pemrosesan usulan penunjukan pengelola keuangan daerah;
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan

Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi dibidang Akuntansi dan Perbendaharaan. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang Akuntansi dan Perbendaharaan;
- 2) Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas;
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- 4) Pengelolaan utang dan piutang daerah;
- 5) Penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan;
- 6) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 7) Pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Administrasi Aset

Bidang Administrasi Aset mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi dibidang Administrasi Aset. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Administrasi Aset mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang Administrasi Aset;
- 2) Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- 3) Penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;
- 4) Penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah;
- 5) Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Belum terintegrasinya perencanaan dan penyusunan APBD
2. Kurangnya Pengetahuan dan keterampilan dalam proses penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam proses penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah diperlukan sesuai tuntutan perubahan. Sampai saat ini masih dirasakan kurang mampu menerima beban kerja yang diberikan sehingga

diperlukan penambahan wawasan dan pengetahuan melalui pengiriman personil untuk mengikuti bimbingan teknis, workshop, pendidikan dan pelatihan yang terkait tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan.

3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan tugas di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan sangat didukung oleh adanya sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan secara berkesinambungan berusaha untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan terutama tempat kerja. Agar kinerja pegawai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan ini dapat terus ditingkatkan

4. Kurang tertibnya Administrasi pengelolaan barang milik daerah

Kurangnya kedisiplinan dari petugas pengelola barang milik daerah mengakibatkan terganggunya proses, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan maupun pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan kinerja berikutnya. Oleh karena itu diperlukan adanya penguatan sistem administrasi pengelolaan barang milik daerah (BMD) serta peningkatan sumber daya manusia dengan adanya pembinaan yang terus menerus bagi petugas pengelola keuangan dan aset daerah.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah periode 2018-2023, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia.

Untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan untuk menerima beban kerja yang diemban sehingga diperlukan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia diperlukan penambahan wawasan dan pengetahuan melalui pengiriman personil untuk mengikuti bimbingan teknis, workshop, pendidikan dan pelatihan yang terkait tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan.

2. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, oleh karena itu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara berkesinambungan berusaha untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan terutama tempat kerja agar kinerja pegawai dapat terus ditingkatkan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada PD dan masyarakat.

3. Disiplinpetugas pengelola keuangan dan aset daerah.

Perlunya peningkatan kedisiplinan pengawasan pada pengelola keuangan dan aset daerah dalam pemanfaatan, pencermatan dan keakuratan data untuk proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan maupun pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sehingga tidak menyebabkan terjadinya keterlambatan kinerja berikutnya. Oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan yang terus menerus bagi petugas pengelola keuangan dan aset daerah.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
5. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;

6. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
7. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 63 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan hasil kesepakatan bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah .

Visi Pemerintah Tahun 2018-2023 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang Religius dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan beragama yang berkualitas;
2. Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi;
3. Menyelenggarakan pelayanan dasar berkualitas dan tata kelola pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya lokal untuk meningkatkan daya saing daerah;
4. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat;
5. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi.

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada Misi ke-2, yaitu :

“Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi”

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Tahun 2018-2023 sebanyak 1 tujuan dan 2 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	1.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		1.2	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	100	100	100	100	100

Sumber : Renstra Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah periode 2018-2023

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satu an	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan		Opini BPK terhadap LKPD		Opini BPK atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/ Wajar Dengan Pengecualian (WDP)/ Tidak Wajar/ Tidak Menyatakan Pendapat	LKPD
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	1.1	Persentase OPD yang melaksana n tata kelola keuangan sesuai ketentuan	Prose ntase	Menghitung perangkat daerah yang melaksana n tata kelola keuangan mulai dari proses penganggara n sampai penyampaian laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku	(Jumlah OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan / Jumlah OPD) x 100%	Laporan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
		1.2	Persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	Prose ntase	Menghitung perangkat daerah yang menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sampai	(Jumlah OPD tertib administrasi pengelolaan Barang Miik Daerah / Jumlah OPD) x 100%	Laporan Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah

					dengan penyampaian Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu		
	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	1.3	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	Indeks	Menghitung kepuasan internal pada pelayanan kesekretariatan	Nilai SKM	Survey Kepuasan Masyarakat Layanan Internal Kesekretariatan

Sumber : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2022

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2022
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	1.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan	Prosentase	100%
			Persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan	Prosentase	100%

				Barang Milik Daerah		
		1.2	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	Indeks	100

Sumber : Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2022

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Pada tanggal 06 bulan Januari tahun 2022 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Opini BPK terhadap LKPD	WTP
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan	100%
		Persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	100%

Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	100
--	--	-----

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Tahun 2022

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD yang Melaksanakan Tatakelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen rencana anggaran daerah yang tersusun tepat waktu/sesuai ketentuan	100 %
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Verifikasi RKA SKPD	1 Kali
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	1 Kali
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Verifikasi DPA SKPD	1 Kali
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan	Jumlah Koordinasi dan	1Kali

	dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Verifikasi Perubahan DPA SKPD	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Perkada Penjabaran APBD	2 Dokumen
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Analisa Standar Belanja	1 Dokumen
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Dokumen
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Laporan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran	2 Dokumen

		Kas dan SPD	
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 Dokumen
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Koordinasi Dokumen Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotong an dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Dokumen
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen

5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Dokumen
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang	100%

		tersalurkan	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Bantuan Keuangan yang tersalurkan	100%
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Persentase Dana Darurat dan Mendesak yang tersalurkan	100%
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota yang dikelola	100%
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan BMD yang tersusun	100%
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Buku Standar Harga	2 Dokumen
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen tentang Validasi dan Inventarisasi BMD	1 Dokumen
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Pengamanan (Jumlah Sertifikasi Tanah), Jumlah Dokumen Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset, Jumlah Dokumen Penyelesaian TPTGR	5 Dokumen
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen tentang Rekonsiliasi Data Laporan BMD	14 Dokumen
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen tentang Laporan Pengadaan BMD	4 Dokumen

5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pejabat yang mendapat info terkini tentang Perubahan Kebijakan Pengelolaan BMD, Jumlah Pejabat Pengelola Barang yang mendapat Sosialisasi Perundang-undangan, Jumlah orang yang mendapat Sosialisasi tentang Peningkatan Keterampilan Pengelolaan BMD	164 Orang
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%
5.02.03.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu	100%
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	4 Dokumen
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	2 Dokumen
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	2 Dokumen
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Disusun	2 Dokumen
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Disusun	2 Dokumen
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	3 Dokumen

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data dan Informasi Perangkat Daerah, Jumlah Laporan triwulan dan Semesteran Monev Perangkat Daerah yang tersusun (APBD, Renja / RKPD)	8 Laporan
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Keuangan PD terlayani tepat waktu	100%
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang dibayarkan tunjangan dan gajinya	100%
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	2 Dok
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun Mingguan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran	4 Dok
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase barang milik daerah pada PD yang teradministrasi dgn baik	100%
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan BMD yang tersusun	1 Dokumen
5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi; Jumlah Laporan BMD yang tersusun	14 Dokumen
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Persentase administrasi	100%

	Daerah	kepegawaian yang terlayani	
5.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin Pegawai yang terpenuhi	70 Orang
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Keikutsertaan Peserta Bintek	70 Orang
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tepat waktu/ sesuai standar/ ketentuan	100%
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	50 Unit
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Jenis
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Jenis
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Kantor yang disediakan	1 Jenis
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Jenis
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	1 Paket
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan	100 Kali

5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Sistem
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	100%
5.02.01.02.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	10 Unit
5.02.01.02.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	1 Jenis
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	2 Jenis
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 Jenis
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	14 Unit

		Jabatan	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17 Unit
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Unit
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu

pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi	LKPD
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Laporan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
		Persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Laporan Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah

	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	100	90,55	90,55%	Tinggi	Survey Kepuasan Masyarakat Layanan Internal Kesekretariatan
Rata-rata Capaian					96,85%	Sangat Tinggi	

Berdasarkan tabel 3.2 diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian dari 3 indikator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan dari 2 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 adalah 96,85% atau sangat tinggi. Adapun tingkat capaian dari masing-masing 3 indikator kinerja yaitu Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan dan Persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah adalah 100% atau sangat tinggi, serta pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan adalah 90,55% atau tinggi, yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pada sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan
 - a. Sebanyak 52 OPD dari total seluruh OPD di Bangkalan yang berjumlah 52 OPD telah melaksanakan penyusunan rencana anggaran sampai penyampaian laporan keuangan sesuai ketentuan, artinya seluruh OPD telah memenuhi tata kelola keuangan sesuai ketentuan sehingga tingkat capaian yang diperoleh adalah 100% atau sangat tinggi
 - b. Sebanyak 52 telah tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dari total seluruh OPD di Bangkalan yang berjumlah 52 OPD, artinya seluruh OPD telah memenuhi proses penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sampai Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan sehingga tingkat capaian yang diperoleh adalah 100% atau sangat tinggi

Faktor pendukung tingginya capaian kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan adalah adanya koordinasi yang intens dengan masing-masing

SKPD dan evaluasi internal yang dilakukan setiap bulan sehingga setiap permasalahan yang terjadi dapat diatasi dengan cepat dan tepat.

2) Pada sasaran terpenuhinya pelayanan kesekretariatan

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat Layanan Internal Kesekretariatan dari bidang-bidang diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu sebesar 90,55% atau tinggi. Capaian ini didukung karena terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan untuk menunjang urusan pemerintahan daerah seperti pencairan gaji dan tunjangan yang tepat waktu, pengadaan alat tulis kantor, peralatan serta kebutuhan sarana dan prasarana lainnya.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	95,08%	100%	100%	100%	100%
2	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan			100	100	90,55	90,55%

Berdasarkan tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pada sasaran ke-1Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan
 - a. OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan pada tahun 2022 mencapai target sebesar100%. Capaian tersebut sama apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yang menunjukkan capaian 100%, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh jadwal Perencanaan, Penyusunan dan Pelaporan Pertanggungjawaban APBD yang diedarkan oleh BPKAD ;
 - b. OPD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah pada tahun 2022 mencapai target sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan angka yang sama apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yang memenuhi capaian target sebesar 100%;
- 2) Pada sasaran ke-2Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan
Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatanpada tahun 2022 memperoleh capaian sebesar 90,55%. Nilai tersebutdiperoleh berdasarkan nilai indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Pada tahun 2021 nilai indeks kepuasan masyarakat dihitung berdasarkan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesekretariatan dengan capaian sebesar 100%. Perbedaan formulasi perhitungan indikator mengakibatkan perbedaan hasil sehingga kinerja pada tahun tersebut tidak dapat dibandingkan.

Faktor pendorong pencapaian sasaran :

- a. Komitmen untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (SIMBADA) dan aplikasi lainnya sehingga mampu mengkoordinasikan OPD dalam melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan dan pengelolaan BMD yang tertib administrasi

- b. Adanya pembinaan kepada seluruh OPD dalam rangka melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan dan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah
- c. Komitmen pegawai untuk memberikan pelayanan prima kepada OPD
- d. Koordinasi yang tinggi dari setiap pegawai untuk melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan

Faktor penghambat pencapaian sasaran :

- a. Belum sempurnanya aplikasi yang digunakan sehingga sering kali terjadi *error system* yang menghambat kegiatan operasional instansi
- b. Perubahan peraturan perundang-undangan yang dinamis

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan	100%	100%	100%

		Barang Milik Daerah			
	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	90,55	100	90,55%

Pada tabel 3.4 dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat kemajuan capaian indikator sasaran pada tahun 2022 terhadap sasaran akhir RENSTRA (2023) adalah 96,85%. Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan indikator Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan dan Persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah dengan tingkat kemajuan masing-masing indikator yaitu sebesar 100%. Adapun sasaran terpenuhinya pelayanan kesekretariatan dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan pada tahun 2022 memiliki tingkat kemajuan capaian target sebesar 90,55%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Opini BPK terhadap LKPD	WTP		
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	100%		100%

	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	90,55%		90,55%
--	--	--	--------	--	--------

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sasaran Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah memenuhi target dari sasaran Renstra pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota se-Jawa Timur sebesar 100%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pada sasaran Rencana Kerja BPKAD Tahun 2022 telah selaras dengan standar nasional yaitu sasaran pada Rencana Strategis BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100 %	Berhasil mencapai target	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	Berhasil mencapai target	
		Persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	Berhasil mencapai target	
2	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	100	90,55	90,55 %	Berhasil mencapai target	

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalandengan indikator persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan dan indikator persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah masing-masing **berhasil mencapai target** sebesar 100%. Adapun sasaran terpenuhinya pelayanan kesekretariatan dengan indikator Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan juga **berhasil mencapai target** dengan capaian 90,55%.

Berikut adalah faktor pendukung keberhasilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai realisasi kinerja yaitu :

1. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan
2. Konsistensi dalam pelaksanaan setiap kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
3. Adanya kerjasama yang terarah, terukur dan inovatif sehingga menciptakan inovasi-inovasi di dalam pelaksanaan program,
4. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2022.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan	100	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD yang Melaksanakan Tatakelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100	Menunjang

				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen rencana anggaran daerah yang tersusun tepat waktu/sesuai ketentuan	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100	
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Verifikasi RKA SKPD	100	
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	100	
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Verifikasi DPA SKPD	100	
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Perkada Penjabaran APBD	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan	Jumlah Dokumen Analisa Standar	100	

				Bidang Anggaran	Belanja		
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	100	
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	100	
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100	Menunjang
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100	
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Laporan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100	
				Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pembiayaan Daerah	100	
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan	Jumlah Koordinasi Dokumen Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,	100	

				Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
				Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	100	
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	100	
				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	100	
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	100	Menunjang

					(SAP)		
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100	
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100	
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan	100	Menunjang
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Bantuan Keuangan yang tersalurkan	100	
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Persentase Dana Darurat dan Mendesak yang tersalurkan	100	
				Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota yang	99	

					dikelola		
		Persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	100	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	Menunjang
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan BMD yang tersusun	100	Menunjang
				Penyusunan Standar Harga	Jumlah Buku Standar Harga	100	
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen tentang Validasi dan Inventarisasi BMD	100	
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Pengamanan (Jumlah Sertifikasi Tanah), Jumlah Dokumen Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset, Jumlah Dokumen Penyelesaian TPTGR	100	
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen tentang Rekonsiliasi Data Laporan BMD	100	
				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen tentang Laporan Pengadaan BMD	100	
				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pejabat yang mendapat info terkini tentang Perubahan Kebijakan Pengelolaan BMD, Jumlah Pejabat Pengelola Barang yang mendapat Sosialisasi Perundang-undangan, Jumlah orang yang	100	

					mendapat Sosialisasi tentang Peningkatan Keterampilan Pengelolaan BMD		
	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	90.55	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu	100	Menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	100	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Disusun	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Disusun	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data dan Informasi Perangkat Daerah, Jumlah Laporan	100	

					triwulan dan Semesteran Monev Perangkat Daerah yang tersusun (APBD, Renja / RKPD)		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Keuangan PD terlayani tepat waktu	100	Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang dibayarkan tunjangan dan gajinya	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun Mingguan/Bulanan/Triwulan/Semesteran	100	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase barang milik daerah pada PD yang teradministrasi dgn baik	100	Menunjang
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan BMD yang tersusun	100	
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi; Jumlah Laporan BMD yang tersusun	100	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani	100	Menunjang
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin Pegawai yang terpenuhi	90	
				Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Aparatur	83.33	

				Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	yang Mengikuti Keikutsertaan Peserta Bintek		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tepat waktu/ sesuai standar/ ketentuan	100	Menunjang
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	100	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Kantor yang disediakan	100	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	100	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	100	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan	100	
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	100	Menunjang

				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	100	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	100	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	100	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	100	

					atau Lapangan		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	
Rata-rata capaian kinerja						100	

Berdasarkan tabel 3.7 dapat diketahui bahwa semua indikator yang telah ditetapkan pada tahun 2022 telah mencapai target dengan rata-rata capaian kinerja dari semua program adalah 100%. Adapun rincian capaian kinerja per program sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Program ini terdiri dari 4 kegiatan dan 25 subkegiatan dengan masing-masing 1 indikator kinerja. Adapun indikator utama dalam Program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Persentase OPD yang Melaksanakan Tatakelola Keuangan Sesuai Ketentuan yang telah tercapai sebesar 100%, capaian tersebut menunjang tercapainya target program. Hal ini berdasarkan jumlah OPD yang telah menyusun penganggaran sampai penyampaian laporan keuangan sesuai ketentuan.

2. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 6 subkegiatan dengan masing-masing 1 indikator kinerja. Adapun indikator utama dari Program Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah mencapai target sebesar 100% sehingga menunjang tercapainya target dari program ini. Hal ini berdasarkan jumlah OPD yang melakukan pengadministrasian barang milik daerah dengan tertib mulai dari proses penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sampai penyampaian Laporan Barang Milik Daerah.

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini terdiri dari 8 kegiatan dan 31 subkegiatan dengan masing-masing 1 indikator kinerja. Adapun indikator utama dari Program

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah yang telah mencapai target sebesar 100% sehingga menunjang tercapainya target dari program ini. Hal ini berdasarkan terpenuhinya seluruh kegiatan dalam penunjang urusan pemerintahan daerah.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	443.236.546.038	440.047.925.117	99.28
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.881.656.725	1.792.288.400	95.25
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	357.422.800	281.850.736	78.86
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	328.940.800	210.539.690	64.01
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	440.668.525.713	437.763.246.291	99.34
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.560.354.575	1.368.149.995	87.68
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.560.354.575	1.368.149.995	87.68
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	52.191.232.683	48.077.864.689	92.12
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	108.767.000	93.508.800	85.97

	Perangkat Daerah			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.626.336.083	43.831.431.568	94.01
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.842.750	19.403.550	97.79
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.150.000	92.972.000	97.71
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	565.280.700	547.329.272	96.82
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	167.226.050	143.641.125	85.9
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.153.765.100	3.014.517.333	72.57
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	454.865.000	335.061.041	73.66

Berdasarkan tabel 3.8 dapat diketahui bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 3 program yang terdiri dari 13 kegiatan dan 62 subkegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 496.988.133.296,-. Adapun realisasi anggaran BPKAD pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 489.493.939.801,- atau 98,49% dari pagu anggaran yang ditetapkan dan terdapat sisa pagu sebesar Rp. 7.494.193.495,-. Rincian anggaran per program dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2022 dilaksanakan melalui 4 kegiatan yang terdiri dari 25 subkegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 443.236.546.038,- dan realisasi sebesar 440.047.925.117,- atau memperoleh capaian sebesar 99.28% dari pagu yang telah ditetapkan dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.188.620.921,-

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah pada tahun 2022 terdiri dari 1 kegiatan dengan 6 subkegiatan dimana pelaksanaan program ini menggunakan pagu sebesar Rp. 1.560.354.575,- dan realisasi sebesar Rp. 1.368.149.995,- atau 87.68% dari pagu yang ditetapkan sehingga anggaran yang tersisa sebesar Rp. 192.204.580,-

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2022 dilaksanakan melalui 8 kegiatan dan 31 subkegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 52.191.232.683,- dan realisasi sebesar Rp. 48.077.864.689,- atau capaian yang diperoleh sebesar 92.12% sehingga terdapat anggaran sisa sebesar Rp. 4.113.367.994,-

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan	WTP	WTP	100%	496.988.133.296	489.493.939.801	98.49%	1.51
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	100%	100%	100%	444.796.900.613	441.416.075.112	99.24%	0.76
	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	443.236.546.038	440.047.925.117	99.28%	0.72
	Prosentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	100%	100%	100%	1.560.354.575	1.368.149.995	87.68%	12.32
2	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	100	90,55	90,55%	52.191.232.683	48.077.864.689	92.12%	-1.57

Berdasarkan tabel 3.9 dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan adalah 98,49% dan capaian kinerja sebesar 100% dengan tingkat efisiensi sebesar 1.51%. Adapun tingkat efisiensi dari masing-masing sasaran dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan memiliki capaian realisasi anggaran sebesar 99.24% dan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% sehingga diperoleh rata-rata tingkat efisiensi sebesar 0.76% dengan rincian indikator sebagai berikut;

1) Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan didukung oleh Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan pada kegiatan :

- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
- b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Capaian realisasi anggaran pada indikator sasaran ini adalah 99.28% dengan capaian kinerja sebesar 100% sehingga diperoleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0.72%

2) Prosentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah didukung oleh Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Capaian realisasi anggaran pada indikator sasaran ini adalah 87.68% dengan capaian kinerja sebesar 100% sehingga diperoleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 12.32%

2. Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan pemerintahan yang didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian realisasi anggaran pada sasaran ini adalah 92,12% dengan capaian kinerja sebesar 90,55% sehingga diperoleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar -1.57% atau tidak ada efisiensi sebab capaian kinerja belum mencapai 100% karena tingginya target yang ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2022 Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran dengan 3 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2022 yaitu Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalandengan indikator kinerja dan target capaian yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam mencapai target tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki 2 sasaran strategis, yaitu:
- Sasaran ke-1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100%
 - Indikator kinerja persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan memiliki target kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100% sehingga nilai capaian sebesar 100%

- Indikator kinerja persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah masing-masing menentukan target kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100% sehingga memperoleh nilai capaian sebesar 100%
- Sasaran ke-2 Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan
 - Indikator Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan menetapkan target kinerja sebesar 100 dengan realisasi kinerja sebesar 90,55 sehingga memperoleh nilai capaian sebesar 90,55%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 496.988.133.296,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 489.493.939.801,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 capaian serapan anggaran sebesar 98,49% dan capaian kinerja 100% dengan nilai efisiensi sebesar 1,51%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun kinerja instansi.

Bangkalan, 28 Februari 2023

KEPALA BPKAD
KABUPATEN BANGKALAN



ABDULAZIZ, S.Si

Pembina Tk I

NIP. 19740729 200312 1 006

LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

Nomor : 188.4/001.3/433.204/2022

Tentang
PEMBENTUKAN TIM SAKIP
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Alamat: Jl. Soekarno Hatta No. 35
BANGKALAN 69116

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
BANGKALAN

NOMOR : 188.4/001.3/433.204/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SAKIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
BANGKALAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022, perlu membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

- Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2 Tahun 2006 seri E);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 seri E);
 16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 38 Tahun 2009 seri E);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupate Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 1/D);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023 Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E);
 21. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 22. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 7/E);
 23. Surat Edaran Bupati Nomor 903/416/433.201/2022 tentang Pedoman penyempurnaan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan 2022;
- KESATU Susunan keanggotaan Tim Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan 2022 terdiri dari pejabat dilingkup Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan 2022 dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh untuk berperan serta dalam penyusunan dokumen-dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan, meliputi:
1. Rencana Kerja Tahunan (RKT);
 2. Perjanjian Kinerja (PK);
 3. Rencana Aksi;
 4. Indikator Kinerja Utama (IKU);
 5. Indikator Kinerja Individu (IKI);
 6. *Cascading*;
 7. Laporan Kinerja (LKj Eselon III s.d Staf) Triwulan 1 - 4 Tahun 2022;
 8. Pengukuran Kinerja Triwulan 1 - 4 Tahun 2022;
 9. Evaluasi Internal berdasarkan Rencana Aksi (Triwulan 1-4) Tahun **2022**;
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kabupaten Bangkalan



ABDUL AZIZ, S.Si

NIP. 19740927 200312 1 006

Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelola
Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Bangkalan

Nomor : 188.4/001.3/433.204/2022

Tanggal : 03 Januari 2022

NO	UNSUR/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan	Ketua
3.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kabid Anggaran	Anggota Bidang Anggaran
5.	Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi	Anggota Bidang Perbendaharaan Akuntansi
6.	Kabid Administrasi Aset	Anggota Bidang Aset
7.	Unsur Staff	Anggota Semua Bidang

KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN



ABDUL AZIZ, S.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19740927 200312 1 006

MATRIKS RENSTRA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

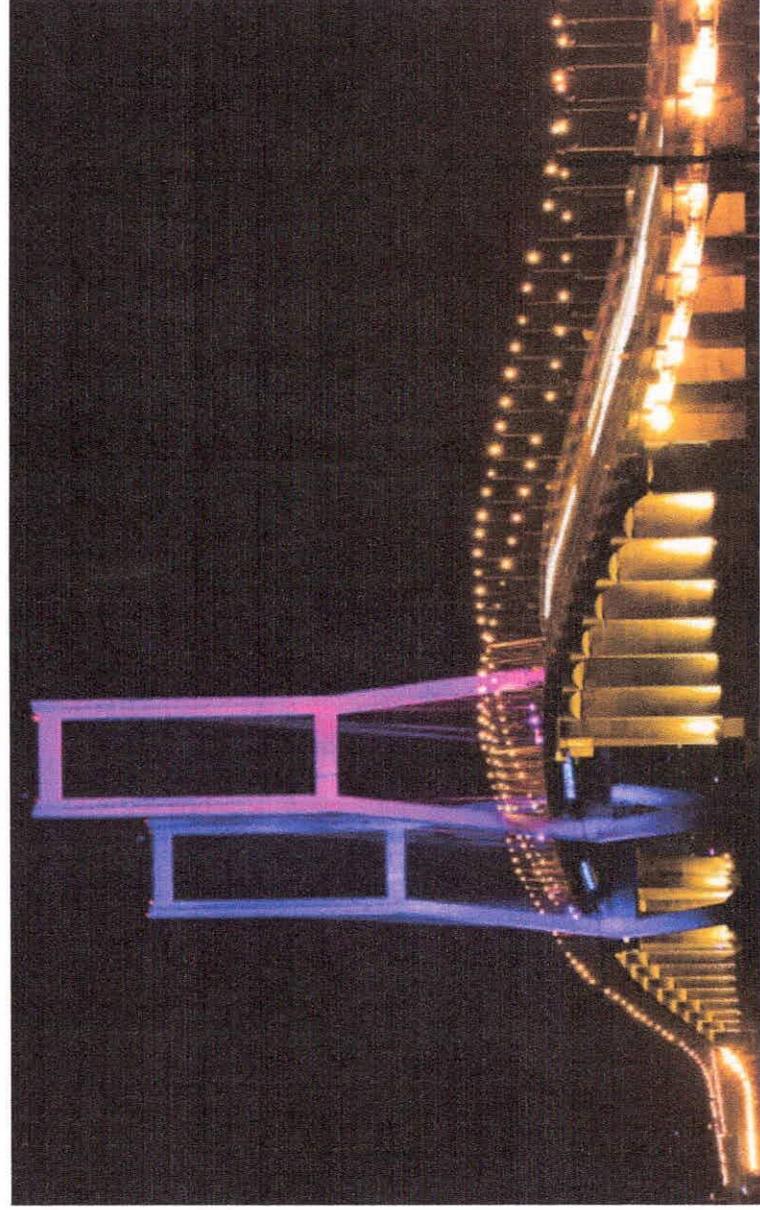
TAHUN 2018-2023

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang Religius dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal		
Misi	Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional & Berintegritas Tinggi		
Tujuan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan		
Sasaran	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bangkalan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas penganggaran	Penerapan Penyusunan penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, analisa standar belanja dan standar satuan harga.
		Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Penerapan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar Akutansi Pemerintahan (SAP)
		Meningkatkan penatausahaan aset daerah	Peningkatan kompetensi pengelolaan aset daerah, peningkatan pemanfaatan dan pengamanan aset daerah
	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Mengoptimalkan sumberdaya kelembagaan untuk menunjang tercapainya kinerja Perangkat Daerah	Memberikan pelayanan yang optimal di internal Perangkat Daerah



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



BPKAD KABUPATEN BANGKALAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. SoekarnoHatta No. 35 Telp/Fax. (031) 3098579 Bangkalan – 69116

Email : bpkad.bangkalankab@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 188.4/514/433.204/2019
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor : Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan hasil praevaluasi Tim Kemen PAN RB, maka dipandang perlu menetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan D
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah;
9. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing pelaksana kegiatan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja serta pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023.
- KETIGA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Sekretaris dan Pelaksana Kegiatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 8 Mei 2019

**KEPALA BPKAD KABUPATEN
BANGKALAN**



Ir. H. SYAMSUL ARIFIN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660802 199602 1 001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyusun dokumen Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023.

Dokumen Perubahan IKU ini disusun dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan disusunnya dokumen Perubahan IKU, diharapkan kita dapat melakukan analisis dan evaluasi kinerja untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang.

Guna menjamin kelancaran dalam mengaplikasikan dokumen perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023, kami mengharap saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak. Besar harapan kami, semoga dokumen perubahan IKU ini bermanfaat.

Bangkalan, 8 Mei 2019

**KEPALA BPKAD KABUPATEN
BANGKALAN**



Ir. H. SYAMSUL ARIFIN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660802 199602 1 001



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menilai tingkat kinerja suatu instansi pemerintah, diperlukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standart, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Namun permasalahan yang sering kita temui saat ini adalah adanya pergantian pimpinan pemerintahan yang diikuti oleh perubahan kebijakan yang tidak serasi lagi dengan kebijakan sebelumnya sehingga essensi rencana pencapaian target kinerja perlu disesuaikan kembali bentuk essensi-essensinya.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan "keys Performance Indicator" di lingkungan instansi masing-masing.

Dengan ditetapkannya IKU diharapkan Instansi Pemerintah dapat melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.



B. Pengertian

Pengertian dari Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategik organisasi.

Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator Kinerja Keluaran (Out put) dan hasil (outcome) dengan tatanan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja utama pada tingkat Kementerian Negara/LPNK/ Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Kota sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
2. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya;
3. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II Satuan Kerja / SKPD / unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

C. TUJUAN

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
-



BAB II

PENETAPAN IKU

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan beberapa hal berikut yaitu :

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. Kebutuhan data statistik pemerintah;
- e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.



Indikator kinerja utama digunakan instansi pemerintah untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama diharapkan setiap pelaksanaan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat dianalisa dan dievaluasi dan pada akhirnya dapat digunakan untuk mengukur kinerja unit organisasi yang bersangkutan.



BAB III

PENUTUP

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan Keys Performance Indicator, harus memenuhi karakteristik spesifik, dapat dicapai, relevan dan dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan dalam menyusun IKU menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal. Dengan penetapan IKU diharapkan dapat meningkatkan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan dimasa mendatang kearah yang lebih baik, efektif, efisien dan akuntabel.

Bangkalan, 8 Mei 2019

**KEPALA BPKAD KABUPATEN
BANGKALAN**



Ir.H.SYAMSUL ARIFIN,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660802 199602 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan
 Nomor : 188.4/514/433.204/2019
 Tanggal , 8 Mei 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2018 – 2023**

TUJUAN : Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	TARGET CAPAIAN KINERJA	
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil Audit BPK (WTP, WDP, TW / Disclamer)	WTP	WTP
		Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	$\frac{\text{Jumlah PD Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan}}{\text{Jumlah PD}} \times 100$	100	100
		Persentase OPD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	$\frac{\text{Jumlah PD yang tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah}}{\text{Jumlah PD seluruhnya}} \times 100$	90	100



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ABDUL AZIZ, S.Si

JABATAN : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

NAMA : R. ABDUL LATIF AMIN IMRON

JABATAN : BUPATI BANGKALAN

Selaku Atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkalan, 03 Januari 2022

PIHAK KEDUA

R. ABDUL LATIF AMIN IMRON

PIHAK PERTAMA,

ABDUL AZIZ, S.Si
NIP. 19740729 200312 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BPKAD KABUPATEN BANGKALAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	1. Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	1. Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%
		1. Persentase PD yang tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	39.841.269.048	
2	Program pengelolaan keuangan daerah	460.391.133.550	
3	Program pengelolaan barang milik daerah	1.404.761.575	
JUMLAH		501.637.164.173	

Bangkalan, 03 Januari 2022

PIHAK KEDUA



R. ABDUL LATIF AMIN IMRON

PIHAK PERTAMA,



ABDUL AZIZ, S.Si
NIP. 19740729 200312 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Drs. WAHID HIDAYAT, MM

JABATAN : SEKRETARIS BPKAD

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

NAMA : ABDUL AZIZ, S.Si

JABATAN : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Selaku Atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA

ABDUL AZIZ, S.Si

NIP. 19740729 200312 1 006

Bangkalan, 03 Januari 2022

PIHAK PERTAMA,

Drs. WAHID HIDAYAT, MM

NIP. 196408222002121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BPKAD KABUPATEN BANGKALAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	500.232.402.598	PPTK : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108.767.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.780.150	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24.733.050	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	24.806.250	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.898.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.252.450	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.530.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.766.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.333.774.673	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.273.465.097	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	39.733.626	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.575.950	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.735.700	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8.645.950	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.089.750	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	106.322.550	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.895.550	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	90.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6.427.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	457.393.425	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.043.650	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.783.250	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.192.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	129.034.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.480.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.950.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.964.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.946.525	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	25.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94.985.700	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	63.453.650	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.532.050	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.297.355.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.885.100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	254.850.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.042.505.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	422.935.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	108.360.000	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.575.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	95.000.000	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	457.689.441.700	
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	444.880.361.700	
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	6000.000.000	
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	6.809.080.000	
JUMLAH	500.232.402.598,-	



KEPALA BPKAD
 KABUPATEN BANGKALAN
ABDUL AZIZ, S.Si
 NIP. 19740729 200312 1 006

Bangkalan, 03 Januari 2022

SEKRETARIS BPKAD
 KABUPATEN BANGKALAN

Drs. WAHID HIDAYAT, MM
 NIP. 196408222002121002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MAHITA TATIYANTI, ST, MT

JABATAN : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

NAMA : Drs. WAHID HIDAYAT, MM

JABATAN : SEKRETARIS BPKAD

Selaku Atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkalan, 03 Januari 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,

Drs. WAHID HIDAYAT, MM
NIP. 196408222002121002

MAHITA TATIYANTI, ST, MT
NIP. 198002102014072003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BPKAD KABUPATEN BANGKALAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.398.727.375	PPTK : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.735.700	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8.645.950	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.089.750	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	106.322.550	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.895.550	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	90.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6.427.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	457.393.425	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.043.650	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.783.250	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.192.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	129.034.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.480.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.950.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.964.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.946.525	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	25.000.000	

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94.985.700	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	63.453.650	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.532.050	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.297.355.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.885.100	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	254.850.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.042.505.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	422.935.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	108.360.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.575.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	95.000.000	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	457.689.441.700	
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	444.880.361.700	
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	6000.000.000	
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	6.809.080.000	
JUMLAH	463.088.169.075,	-

SEKRETARIS BPKAD
KABUPATEN BANGKALAN

Drs. WAHID Hidayat, MM
NIP. 196408222002121002

Bangkalan, 03 Januari 2022

KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN


MAHITA TATIYANTI, ST, MT
NIP. 198002102014072003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SANTI YULINDA, SE

JABATAN : KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

NAMA : Drs. WAHID HIDAYAT, MM

JABATAN : SEKRETARIS BPKAD

Selaku Atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkalan, 03 Januari 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,


Drs. WAHID HIDAYAT, MM
NIP. 196408222002121002


SANTI YULINDA, SE
NIP. 197907272009032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BPKAD KABUPATEN BANGKALAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.442.541.673	PPTK : Kasubag Keuangan Dan Perencanaan
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108.767.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.780.150	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24.733.050	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	24.806.250	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.898.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.252.450	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.530.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.766.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.333.774.673	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.273.465.097	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	39.733.626	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.575.950	
	JUMLAH	34.442.541.673,	-

Bangkalan, 03 Januari 2022

SEKRETARIS BPKAD

KASUBBAG KEUANGAN DAN PERANCANAAN


Drs. WAHID HIDAYAT, MM
NIP. 196408222002121002


SANTI YULINDA, SE
NIP. 197907272009032001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RADEN PANDJI ABDOESJAHID, SE

JABATAN : KEPALA BIDANG ADMINISTRASI ASET

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

NAMA : ABDUL AZIZ, S.Si

JABATAN : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Selaku Atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkalan, 03 Januari 2022

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA

ABDUL AZIZ, S.Si

NIP. 19740729 200312 1 006

RADEN PANDJI ABDOESJAHID, SE

NIP. 19701007 199703 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BPKAD KABUPATEN BANGKALAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Persentase PD yang tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.404.761.575	PPTK : Kepala Bidang Administrasi Aset
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.404.761.575	
	Penyusunan Standar Harga	284.141.350	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	27.530.650	
	Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	876.254.275	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	44.652.450	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	108.153.550	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	64.029.300	
	JUMLAH	1.404.761.575,-	

Bangkalan, 03 Januari 2022



KEPALA BPKAD
KABUPATEN BANGKALAN

ABDUL AZIZ, S.Si
NIP. 19740729 200312 1 006

KEPALA BIDANG
ADMINISTRASI ASET


RADEN PANDJI ABDOESJAHID, SE
NIP. 19701007 199703 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : HIKMAH KURNIATI, SE

JABATAN : KASUBID PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN ASET

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

NAMA : RADEN PANDJI ABDOESJAHID, SE

JABATAN : KEPALA BIDANG ADMINISTRASI ASET

Selaku Atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkalan, 03 Januari 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,

RADEN PANDJI ABDOESJAHID, SE
NIP. 19701007 199703 1 003

HIKMAH KURNIATI, SH
NIP. 19821211 200501 2 012

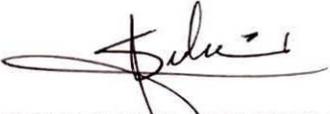
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BPKAD KABUPATEN BANGKALAN

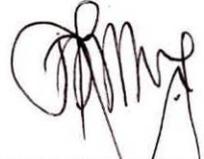
NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Persentase PD yang tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	528.507.300,-	PPTK : Kepala Bidang Administrasi Aset
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	528.507.300	
	Penyusunan Standar Harga	284.141.350	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	27.530.650	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	44.652.450	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	108.153.550	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	64.029.300	
	JUMLAH	528.507.300,-	

KEPALA BIDANG
ADMINISTRASI ASET


RADEN PANDJI ABDOESJAHID, SE
NIP. 19701007 199703 1 003

Bangkalan, 03 Januari 2022
KASUBID PERENCANAAN DAN
PENATAUSAHAAN ASET


HIKMAH KURNIATI, SH
NIP. 19821211 200501 2 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ISMAIL, S.Sos

JABATAN : PENILAI PEMERINTAH AHLI MUDA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

NAMA : RADEN PANDJI ABDOESJAHID, SE

JABATAN : KEPALA BIDANG ADMINISTRASI ASET

Selaku Atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkalan, 03 Januari 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,

RADEN PANDJI ABDOESJAHID, SE
NIP. 19701007 199703 1 003

ISMAIL, S.Sos
NIP. 197007141 99602 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : DINI ANANTA ZANI, SE

JABATAN : KASUBID PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN ASET

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

NAMA : RADEN PANDJI ABDOESJAHID, SE

JABATAN : KEPALA BIDANG ADMINISTRASI ASET

Selaku Atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkalan, 03 Januari 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,

RADEN PANDJI ABDOESJAHID, SE
NIP. 19701007 199703 1 003

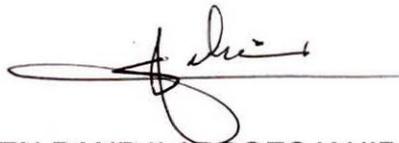
DINI ANANTA ZANI, SE
NIP. 19820524 200312 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BPKAD KABUPATEN BANGKALAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Persentase PD yang tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pengelolaan Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	876.254.275	PPTK : Kepala Bidang Administrasi Aset
JUMLAH		876.254.275,-	

KEPALA BIDANG
ADMINISTRASI ASET



RADEN PANDJI ABDOESJAHID, SE
NIP. 19701007 199703 1 003

Bangkalan, 03 Januari 2022

KASUBID PEMANFAATAN DAN
PENGAMANAN ASET



DINI ANANTA ZANI, SE
NIP. 19820524 200312 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MOH. WAKI, SH, M.A.P

JABATAN : KEPALA BIDANG ANGGARAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

NAMA : ABDUL AZIZ, S.Si

JABATAN : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Selaku Atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkalan, 03 Januari 2022

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA

ABDUL AZIZ, S.Si
NIP. 19740729 200312 1 006

MOH. WAKI, SH, M.A.P
NIP. 19790210 200501 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BPKAD KABUPATEN BANGKALAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.906.120.000	PPTK : Kepala Bidang Anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	62.859.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	61.361.500	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	26.172.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	26.172.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	35.375.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	35.375.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	845.546.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	583.032.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	160.415.000	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	48.720.250	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	11.392.250	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	9.700.000	
	JUMLAH	1.906.120.000,-	

Bangkalan, 03 Januari 2022

KEPALA BPKAD
KABUPATEN BANGKALAN


ABDUL AZIZ, S.Si
NIP. 19740729 200312 1 006

KEPALA BIDANG
ANGGARAN,


MOH. WAKI, SH, M.A.P
NIP. 19790210 200501 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : DARUSSALAM, SH., M.Akun

JABATAN : KASUBBID ANGGARAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

NAMA : MOH. WAKI, SH., M.A.P

JABATAN : KEPALA BIDANG ANGGARAN

Selaku Atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkalan, 03 Januari 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,

MOH. WAKI, SH., M.A.P
NIP. 19790210 200501 1 009

DARUSSALAM, SH., M.Akun
NIP. 19720124 199602 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ACHMAD SJOHIB,SE

JABATAN : ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

NAMA : MOH. WAKI, SH, M.A.P

JABATAN : KEPALA BIDANG ANGGARAN

Selaku Atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkalan, 03 Januari 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,

MOH. WAKI, SH, M.A.P
NIP. 19790210 200501 1 009

ACHMAD SJOHIB, SE
NIP. 19650128 198603 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BPKAD KABUPATEN BANGKALAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	123.094.000	PPTK : Kepala Bidang Anggaran
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	26.172.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	26.172.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	35.375.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	35.375.000	
	JUMLAH	123.094.000,-	

Bangkalan, 03 Januari 2022

KEPALA BIDANG
ANGGARAN

ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA



MOH. WAKI, SH, M.A.P
NIP. 19790210 200501 1 009



ACHMAD SJOHIB, SE
NIP. 19650128 198603 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : BEDI EKA HIDAYANTO, ST

JABATAN : KASUBBID ANGGARAN BELANJA DAERAH I

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

NAMA : MOH. WAKI, SH, M.A.P

JABATAN : KEPALA BIDANG ANGGARAN

Selaku Atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkalan, 03 Januari 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,

MOH. WAKI, SH, M.A.P
NIP. 19790210 200501 1 009

BUDI EKA HIDAYANTO, ST
NIP. 19770213 201407 1 005

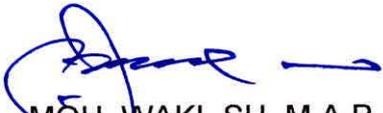
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BPKAD KABUPATEN BANGKALAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.600.385.250	PPTK : Kepala Bidang Anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	845.546.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	583.032.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	160.415.000	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	11.392.250	
	JUMLAH	1.600.385.250,	-

Bangkalan, 03 Januari 2022

KEPALA BIDANG
ANGGARAN


MOH. WAKI, SH, M.A.P
NIP. 19790210 200501 1 009

KASUBBID ANGGARAN BELANJA
DAERAH I


BIJI EKA HIDAYANTO, ST
NIP. 19770213 201407 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : YUDIYANTO HIDAYAT, SE.,MM

JABATAN : KEPALA BIDANG AKUNTASI DAN PERBENDAHARAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

NAMA : ABDUL AZIZ, S.Si

JABATAN : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Selaku Atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkalan, 03 Januari 2022

PIHAK PERTAMA,

YUDIYANTO HIDAYAT, SE.,MM
NIP. 19770105 199703 1 006

PIHAK KEDUA



ABDUL AZIZ, S.Si
NIP. 19740729 200312 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BPKAD KABUPATEN BANGKALAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	795.571.850	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	309.820.800	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	13.029.900	PPTK : Kasubbid Penatausahaan Belanja & Verifikasi I
	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	14.590.200	
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	15.595.100	
	Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	24.385.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	58.464.850	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	16.272.300	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	17.214.250	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	150.268.700	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	485.751.050	PPTK : Kasubbid Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Kas
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	69.606.750	

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	72.525.250	
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	141.467.850	
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	160.049.950	
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	42.101.250	
JUMLAH	795.571.850,-	

Bangkalan, 03 Januari 2022



KEPALA BPKAD
KABUPATEN BANGKALAN

ABDUL AZIZ, S.Si
NIP. 19740729 200312 1 006

KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN
PERBENDAHARAN

YUDIYANTO HIDAYAT, SE., MM
NIP. 19770105 199703 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ACHMAD WAHYUDI, SE

JABATAN : KASUB BIDANG PENATAUSAHAAN BELANJA & VERIFIKASI I

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

NAMA : YUDIYANTO HIDAYAT, SE, MM

JABATAN : KEPALA BIDANG AKUNTASI DAN PERBENDAHARAN

Selaku Atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

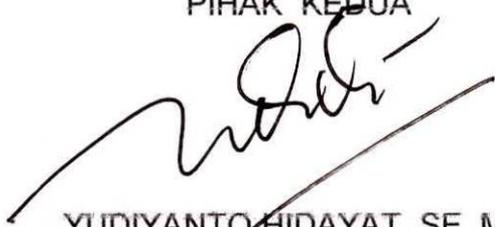
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkalan, 03 Januari 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,


YUDIYANTO HIDAYAT, SE., MM
NIP. 19770105 199703 1 006


ACHMAD WAHYUDI, SE
NIP. 19730126 199602 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BPKAD KABUPATEN BANGKALAN

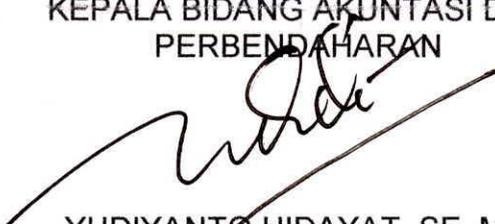
NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		PPTK : Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja & Verifikasi I
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	24.385.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	58.464.850	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	16.272.300	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	17.214.250	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	150.268.700	
	JUMLAH	266.605.600,-	

Bangkalan, 03 Januari 2022

KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN
PERBENDAHARAN

KASUB BIDANG PENATAUSAHAN
BELANJA & VERIFIKASI I


YUDIYANTO HIDAYAT, SE., MM
NIP. 19770105 199703 1 006


ACHMAD WAHYUDI, SE
NIP. 19730126 199602 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SARWONO, S.IP, M.Ak

JABATAN : ANALIS PERBENDAHARAAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

NAMA : YUDIYANTO HIDAYAT, SE, MM

JABATAN : KEPALA BIDANG AKUNTASI DAN PERBENDAHARAN

Selaku Atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

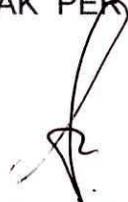
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkalan, 03 Januari 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,


YUDIYANTO HIDAYAT, SE.,MM
NIP. 19770105 199703 1 006


SARWONO, S.IP, M.Ak
NIP. 19741230 199402 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BPKAD KABUPATEN BANGKALAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		PPTK : Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja & Verifikasi I
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	13.029.900	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	14.590.200	
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	15.595.100	
	JUMLAH	43.215.200,-	

Bangkalan, 03 Januari 2022

KEPALA BIDANG AKUNTASI DAN
PERBENDAHARAN

ANALIS PERBENDAHARAAN AHLI
MUDA


YUDIYANTO HIDAYAT, SE.,MM
NIP. 19770105 199703 1 006


SARWONO, S.IP, M.Ak
NIP. 19741230 199402 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : NURUL HIDAYAT, SE

JABATAN : KASUB BIDANG PERTANGGUNGJAWABAN & PENGELOLA KAS

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

NAMA : YUDIYANTO HIDAYAT, SE, MM

JABATAN : KEPALA BIDANG AKUNTASI DAN PERBENDAHARAN

Selaku Atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkalan, 03 Januari 2022

PIHAK KEDUA


YUDIYANTO HIDAYAT, SE..MM
NIP. 19770105 199703 1 006

PIHAK PERTAMA,


NURUL HIDAYAT, SE
NIP. 19720528 200112 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BPKAD KABUPATEN BANGKALAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%

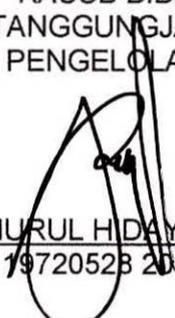
NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	485.751.050	PPTK : Kepala Sub Bidang Pertanggungjawaban & Pengelola Kas
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	69.606.750	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	72.525.250	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	141.467.850	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	160.049.950	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	42.101.250	
	JUMLAH	485.751.050,-	

KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN
PERBENDAHARAN


YUDIYANTO HIDAYAT, SE., MM
NIP. 19770405 199703 1 006

Bangkalan, 03 Januari 2022

KASUB BIDANG
PERTANGGUNGJAWABAN &
PENGELOLA KAS


NURUL HIDAYAT, SE
NIP. 19720528 200112 1 004